

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2021. “Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,51 Persen”
[Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) (diakses pada 15 Desember 2021)
- Bambang, Robertus. 2020. “Pencairan Anggaran ala Pandemi (Studi Kasus pada KPPN Palopo)”, [Pencairan Anggaran ala Pandemi \(Studi Kasus pada KPPN Palopo\) \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id) (diakses pada 18 Desember 2021)
- Dj. 2021. “Wamenkeu: Realisasi PEN Sudah Capai Rp433,91 Triliun”,
[Website PEN \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id) (diakses pada 5 April 2021)
- DJPb. (n.d.). “Profil Sejarah Kanwil DJPB”, [Sejarah \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id) (diakses pada 27 April 2021)
- DJPb. (n.d.). “Profil KPPN Ambon”, [Profil - KPPN Ambon | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara - DJPb Kemenkeu RI Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI](https://kemenkeu.go.id) (diakses pada 28 April 2021)
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2017. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Pencairan Dana”. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 124 hal.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2017. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Seksi Bank”. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 67 hal.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2021. “Pelaporan Keuangan”,
<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html> (diakses pada 16 Desember 2021)
- Ekonomi, Guru. 2020. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”,
<https://sarjanaekonomi.co.id/tujuan-apbn/> (diakses pada 15 Desember 2021).

- Harjima. 2020. “Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan”, Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan (kemenkeu.go.id) (diakses pada 27 April 2021)
- Kementerian Keuangan RI. 2020. “Juknis Penggunaan Aplikasi eSPM pada KPPN, Kewenangan FO Konversi”, Haipedia 2.0 (kemenkeu.go.id) (diakses pada 1 April 2021)
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-44/PB/2007 tentang Reformasi Birokrasi Unit Ditjen Perbendaharaan
- Keputusan direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- Nazir, M. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Oktari, Rosi. 2020. “4 Fokus Kebijakan dalam APBN 2021”, 4 Fokus Kebijakan dalam APBN 2021 | Indonesia Baik (diakses pada 17 Desember 2021)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja APBN Atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disaease* 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02//2018 tentang Klasifikasi Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam
Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
SPAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan
Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen
Elektronik Melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

Peraturan Menteri Keuangan 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Rahmatullah. 2020. “Peran Strategis KPPN di Masa Pandemi”, Peran Strategis
KPPN di Masa Pandemi (kemenkeu.go.id) (diakses pada 18 Desember 2021)

Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”.
Bandung:CV Alfabeta

Surat Edaran Nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen
Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara